

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Ike Roza Mardian¹, Yurniwati^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas
che.ches1983@gmail.com, yurniwati.fekon.unand@gmail.com,

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 10 September 2022

Disetujui : 19 September 2022

Dipublikasi : 1 Oktober 2022

ABSTRACT

Accountability is an obligation to be responsible for the implementation of activities and final results to the community as the holder of the obligation, in accordance with the provisions of the legislation. The people through the DPR/DPD give authority to the government to manage economic resources, therefore the government has the obligation to convey responsibility, report, present and disclose all activities and activities that are the responsibility of management. This research is to examine the effect of the Government's Internal Control System, information technology and organizational commitment to the Accountability of Financial Management of the Covid 19 BTT Fund in the West Sumatra Provincial Government. The data processed is primary data obtained directly from respondents, namely financial and asset managers at the Regional Apparatus Organization (OPD) of the West Sumatra Provincial Government which manages the BTT Covid 19 budget for the 2020 and 2021 Fiscal Years. The results showed that the Government's Internal Control System had an effect on the Accountability of Financial Management of the BTT Covid 19 Fund with the highest indicator being the control environment dimension and the lowest indicator being the risk assessment dimension, while information technology and organizational commitment had no effect on Management Accountability. Finance of the BTT Covid 19 Fund.

Keywords: *Accountability; BTT Covid 19 Fun; Government's Internal Control System, Information Technolog; Organizational Commitment*

PENDAHULUAN

Konsep akuntabilitas bukanlah hal yang baru di sektor publik Indonesia, seluruh instansi pemerintahan pada tingkatan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menekankan penerapan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administratif pemerintahan guna memberikan pelayanan terbaik kepada publik (Julia dan Wahidahwati, 2020). Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama penyelenggaraan negara, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 tahun 1999). Pemerintah memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya ekonomi sehubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta menyampaikan pertanggungjawaban tersebut kepada masyarakat dan pihak lain yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut (Artini dan Putra, 2020).

Mengacu pada teori keagenan (*agency theory*), akuntabilitas muncul sebagai konsekuensi logis adanya hubungan antara *agent* dan *principal*. Akuntabilitas berawal untuk memenuhi permintaan atau kewajiban untuk memberikan keterangan (justifikasi) atas aktivitas yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sebagai jawabannya (Kholmi, 2010). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk

memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Haryanto *et al.*, 2007). Berdasarkan teori keagenan (*agency theory*), pengelolaan keuangan harus diawasi dengan tujuan untuk memberikan keyakinan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indraswari dan Rahayu, 2021).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengelola sumber daya kekayaan daerah serta keseluruhan kegiatan pemerintah daerah dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azizah *et al.*, 2015; Hardiningsih *et al.*, 2019; Arfiansyah, 2020). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat dan DPRD terkait keberhasilan maupun kegagalannya sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah (Fauziyah dan Handayani, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi efektivitas penerapan SPIP dalam operasional instansi pemerintah. SPIP berperan dalam mempromosikan akuntabilitas, yaitu memastikan legalitas dan keteraturan operasi instansi pemerintah serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi dan efektivitas manajemen secara umum (Nogueira dan Jorge, 2017). Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan melalui penerapan SPIP meminimalisir tindakan penyelewangan, mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi, memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian bahwa pelayanan publik dilakukan secara ekonomis dan efisien (Ichlas *et al.*, 2014; Juwita, 2014; Widayatama *et al.*, 2017; Arfiansyah, 2020; Puspa dan Prasetyo, 2020).

Pemanfaatan teknologi informasi pada proses pengelolaan keuangan daerah, meliputi tahap perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. karena dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan pengolahan data, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyelewangan sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan secara tepat dan cepat (Marlina *et al.*, 2021). Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat karena mampu menyediakan informasi *real time* (Aziiz dan Prastiti, 2019) dan mempermudah proses penyajian laporan-laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan manajemen pemerintah daerah secara akurat dan tepat waktu sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat (Momuat, 2016). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan memungkinkan pengawasan karena integrasi seluruh tahapan dalam pengelolaan keuangan mencakup perencanaan, penatausahaan serta pertanggungjawaban.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh komitmen organisasi instansi pemerintahan. Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang pegawai memihak kepada organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (Ikhsan dan Isaac, 2008). Komitmen organisasi memiliki kontribusi besar pada organisasi sektor publik, karena banyaknya pemangku kepentingan dan semuanya ingin mendapatkan pelayanan publik yang maksimal (Syafri dan Alwi, 2014). Komitmen organisasi merupakan elemen penting dari akuntabilitas (Cavoukian *et al.*, 2010), yaitu sebagai media psikologis organisasi kepada karyawan untuk dapat menjalankan organisasi sesuai dengan kinerja yang diharapkan organisasi (Chong dan Chong, 2002). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan karyawan membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi (Zeyn, 2011). Keterikatan emosional menyebabkan aparatur merasa senang dan memiliki loyalitas tinggi dalam bekerja dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan penuh tanggung jawab dan sukarela (Mutiana *et al.*, 2017).

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh komponen keuangan daerah termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), yaitu pos belanja untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. BTT dianggarkan pada setiap pemerintah daerah terutama di daerah rawan bencana untuk mengantisipasi kejadian bencana, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Pada tabel 1, terlihat bahwa anggaran BTT Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini terkait kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan Dana BTT dalam rangka mengatasi pandemi covid 19 berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2020. Hal ini disebabkan keputusan pemerintah menetapkan pandemi Covid 19 sebagai bencana nasional non alam melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Penyediaan APBD untuk penanggulangan bencana merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab terhadap masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum serta memberikan perlindungan masyarakat dari dampak bencana sebagaimana diamanatkan pada UU No 24 Tahun 2007.

Tabel 1
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 - 2021

No	Tahun	Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	2019	3.153.768.000,00	1.945.909.488,00	61,60
2	2020	509.059.730.158,76	445.660.792.457,00	87,55
3	2021	107.000.000.000,00	71.352.130.954,00	66,68

Sumber: Lap. Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Anggaran BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersumber dari penjadwalan ulang berbagai program dan kegiatan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui mekanisme pergeseran anggaran yang ditetapkan pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kesehatan yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak Pandemi Covid 19 berkewajiban untuk menyiapkan perencanaan yang tepat dalam waktu relatif singkat dalam bentuk penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk selanjutnya diverifikasi Inspektorat Daerah. Proses pencairan dana BTT Covid 19 oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening kepada bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja (RKB). Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melaksanakan proses penatausahaan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), teknologi informasi dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini didasarkan kepada fenomena peningkatan anggaran dan karakteristik khusus Dana BTT Covid 19 mencakup sumber dana, proses perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan yang dilaksanakan secara cepat guna mengatasi kedaruratan kesehatan serta pentingnya akuntabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

STUDI LITERATUR

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP No. 60 Tahun 2008). Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban baik di pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat (Azizah *et al.*, 2015). Hasil penelitian Yesinia *et al.* (2018), Aziiz dan Prastiti (2019), Arfiansyah (2020) menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan penelitian Widyaningsih (2015), Setyanto dan Ritchi (2018), Mulyanto *et al.* (2020) dan Hardiningsih *et al.* (2019) juga menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah

H1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Teknologi informasi digunakan untuk mengolah data, yaitu memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang, relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Suparman *et al.*, 2014). Rofika dan Ardianto (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas karena memberikan manfaat pada tahap pemrosesan informasi, tahap penyimpanan informasi dan tahap penyebaran informasi. Pada tahap pemrosesan informasi, penggunaan teknologi informasi dapat memudahkan pelaksanaan pekerjaan, efisiensi waktu, meningkatkan akurasi serta transparansi (Pahlawan *et al.*, 2020) sehingga memenuhi kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat sebagaimana dinyatakan pada Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 24 Tahun 2005). Pada tahap penyimpanan informasi, adanya database terkomputerisasi akan memudahkan proses pengambilan serta penyimpanan data dan informasi. Pada tahap penyebaran informasi, penggunaan teknologi informasi akan menghasilkan informasi yang relevan karena mempermudah akses dan komunikasi informasi antar pihak-pihak yang berkepentingan (Salehi dan Torabi, 2012).

Hasil penelitian yang dilakukan Sapartiningsih *et al.* (2018), Sarah *et al.* (2020), Marlina *et al.* (2021) dan Indraswari dan Rahayu (2021) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Pujiswara *et al.* (2014) dan Setyanto dan Ritchi (2018) juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

H2 : Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku yang digunakan organisasi untuk memberikan kekuatan pada karyawan untuk bertahan dan menjadi bagian suatu organisasi (Aprilya dan Fitria, 2020). Komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki organisasi, akibatnya karyawan mempunyai rasa tanggungjawab dan kesadaran untuk melaksanakan pekerjaannya dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya (Zeyn, 2011). Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota

organisasi (Mutiana *et al.*, 2017). Dengan demikian komitmen organisasi merupakan faktor internal dalam diri setiap pekerja yang dapat mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi, karena pekerja yang memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap organisasi cenderung memiliki sikap keberpihakan, rasa cinta, dan kewajiban yang tinggi terhadap instansi sehingga hal ini akan memotivasi mereka untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dibebankan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik agar menjadi lebih baik (Sarah *et al.*, 2020). Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen penting dari akuntabilitas (Cavoukian *et al.*, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.* (2017), Mualifu *et al.* (2019). (Aprilya dan Fitria (2020)), Sari dan Padnyawati (2021), dan Zulkifli *et al.* (2021) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H3 : Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Covid 19 Bidang Kesehatan

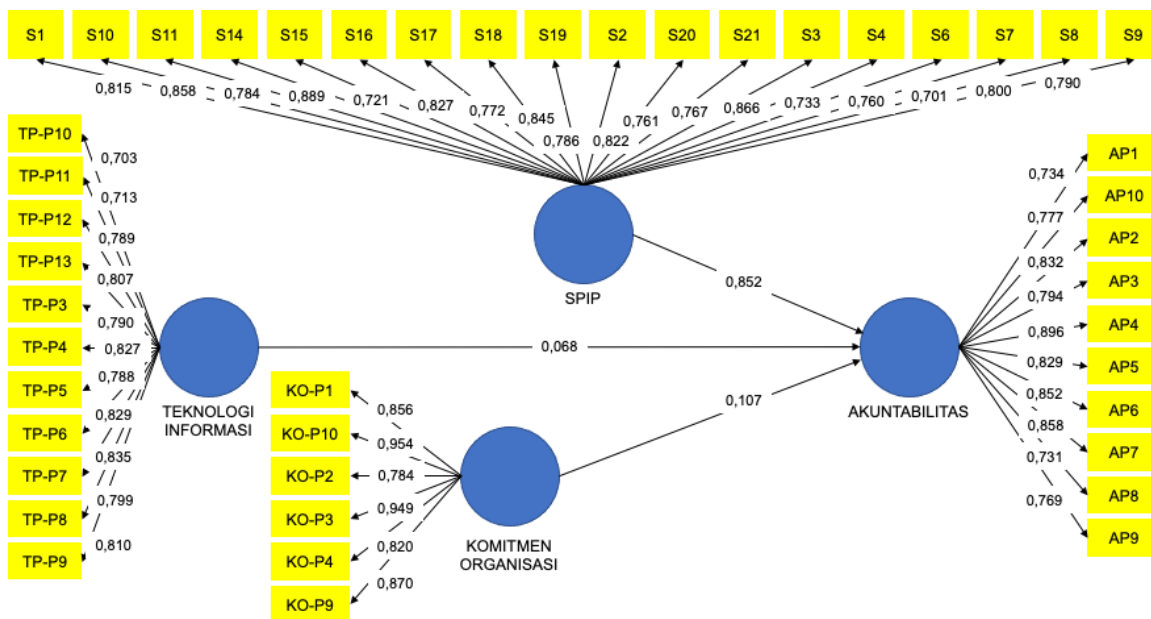
METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif verifikasi dengan unit analisis OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengelola anggaran BTT Covid 19 di Bidang Kesehatan tahun anggaran 2020 dan 2021. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari pengelola keuangan dan aset pada OPD terkait, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, RSUD Pariaman, RSAM Bukittinggi, RSJ HB Saanin Padang dan RSUD M. Natsir Solok. Variabel dependen pada penelitian ini adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan mencakup dimensi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas keuangan. Variabel independen penelitian ini terdiri atas (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), mencakup dimensi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi serta pemantauan, teknologi informasi dan komitmen organisasi, (2) teknologi informasi, mencakup dimensi hardware, software, infoware, brainware dan jaringan serta (3) komitmen organisasi, mencakup dimensi komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif

Metode pengumpulan data primer menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala likert 1 - 5 yang disebarkan kepada para responden yaitu para pengelola keuangan dan aset BTT Covid 19 Tahun 2020 dan Tahun 2021 di setiap OPD unit analisis yaitu: Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kepala Sub Bagian Keuangan/Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pengurus Barang, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan, staf Subbag Keuangan dan Subbag Perencanaan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan sebanyak 52 orang. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur terhadap responden yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan Dana BTT Covid 19 pada setiap OPD guna melengkapi dan memperkuat hasil pengumpulan data melalui kuisisioner. Metode analisis data penelitian adalah analisis statistik inferensial dengan menggunakan software *SmartPLS (Partial Least Square)* 3.0 mencakup pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) dan pengujian hipotesis.

HASIL

Pengukuran Outer Model



Gambar 1. Outer Loading

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa seluruh butir pertanyaan memiliki nilai *outer model* diatas 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuisioner penelitian adalah valid.

Composite Validity

Tabel 2
 Nilai Composite Validity

Variabel	Cronbach Alpha	Composite Reliability	Keterangan
Akuntabilitas	0,941	0,950	Reliable
SPIP	0,966	0,969	Reliable
Teknologi Informasi	0,940	0,948	Reliable
Komitmen Organisasi	0,937	0,951	Reliable

Sumber : Hasil Olah Smart PLS 3.0

Berdasarkan tabel 2 diketahui nilai *cronbach alpha* dan nilai *composite reliability* masing-masing konstruk atau variabel besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki tingkat kehandalan data yang baik atau *reliable*.

Evaluasi Pengukuran Inner Model
 Uji R-square (R2)

Tabel 3
 Nilai R-square (R2)

Variabel	R-square	R-square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT (Y)	0.755	0,739

Sumber : Hasil olah smart PLS 3.0

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai *R-squares* adalah 0.755. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 sebesar 75,5%. Dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar varibel dalam penelitian ini

Pengujian Hipotesis

Tabel 4
Hasil Perhitungan *Bootstrapping* Data Penelitian

Uraian	Original Sample	Sample Mean	Standard Deviation	t-Statistik	p-Value
Sistem Pengendalian Intern (X1) => Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 (Y)	0,852	0,858	0,128	6,654	0,000
Teknologi Informasi (X2) => Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 (Y)	-0,068	-0,027	0,143	0,478	0,633
Komitmen Organisasi (X3) => Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 (Y)	0,107	0,079	0,151	0,705	0,481

Hasil pengolahan data yang ditunjukkan pada tabel 4 diketahui bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki nilai t-statistik sebesar 6,654 lebih besar dari pada nilai t-tabel 2,00856. Dengan demikian hipotesis 1 diterima yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19. Untuk variabel teknologi informasi, nilai t-statistik sebesar 0,478 lebih kecil dari pada nilai t-tabel 2,00856. Dengan demikian hipotesis 2 ditolak yaitu teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19. Untuk variabel komitmen organisasi, nilai t-statistik sebesar 0,705 lebih kecil dari pada t-tabel 2,00856. Dengan demikian hipotesis 3 penelitian ditolak, yaitu komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19.

Persamaan regresi berdasarkan tabel 4 adalah sebagai berikut :

$$Y = 0,852 (X1) - 0,068 (X2) + 0,107 (X3)$$

PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Hasil penelitian menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerapan tindakan dan prosedur pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan dana BTT Covid 19 meningkatnya akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan Dana BTT Covid 19. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menciptakan dan memelihara lingkungan organisasi yang dapat menimbulkan perilaku positif, mendukung terlaksanakannya pengendalian intern dan manajemen yang sehat. serta melakukan tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan Dana BTT Covid 19. Hasil analisis ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan terhadap pejabat Esselon III dan IV yang membawahi perencanaan, keuangan dan pelaporan keuangan pada OPD unit analisis penelitian ini bahwa bahwa pengelolaan Dana BTT Covid 19 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Permendagri No 20 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban pertanggungjawaban, OPD pengelola Dana BTT Covid 19 menyampaikan laporan realisasi kepada Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Hasanah *et al.* (2020) dan Arfiansyah (2020) bahwa prosedur-prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan melalui penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dapat meminimalisir tindakan penyelewangan yang dilakukan oleh aparatur dan memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pahlawan et al. (2020) menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa serta hasil penelitian Sundari dan Mulyadi (2018) juga menemukan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan di tingkat kementerian.

Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Hasil penelitian menemukan bahwa teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dana BTT Covid 19 Bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan keuangan Dana BTT Covid 19. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum optimal dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan Dana BTT Covid 19 yang bersifat darurat dan mendesak, padahal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitas serta ketersediaan jaringan internet dengan kualitas yang baik karena lokasi yang berada di ibu kota Provinsi Sumatera Barat

Hasil analisis ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan terhadap pejabat Eselon III dan IV yang membawahi perencanaan, keuangan dan pelaporan keuangan pada OPD unit analisis penelitian ini, bahwa pengelolaan Dana BTT Covid 19 mulai dari tahap perencanaan berupa penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), tahap penatausahaan berupa penyusunan Buku Kas Umum (BKU) dan tahap pelaporan berupa penyusunan Laporan Pertanggungjawaban dilaksanakan dengan menggunakan Ms. Excel. Kondisi ini disebabkan karena aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi merupakan bentuk investasi aset tetap tidak berwujud yang menuntut pendanaan dalam jumlah yang relatif besar mulai dari tahap perancangan, pembangunan dan pemeliharaan. Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun belum mampu untuk melakukan investasi dalam bentuk aplikasi pengelolaan keuangan terintegrasi.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Pahlawan *et al.* (2020) menemukan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi pengelolaan keuangan berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian gung jawabkan pengelolaan keuangan secara tepat dan cepat Marlina *et al.* (2021) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan pengolahan data serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyelewangan sehingga pemerintah dapat mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan secara tepat dan cepat serta hasil penelitian Aziiz dan Prastiti (2019) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat karena mampu menyediakan informasi real time dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan

Komitmen Organisasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

Hasil penelitian menemukan bahwa Komitmen Organisasi (X3) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban

akuntabilitas pemerintah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19. Kurangnya integritas dan dorongan yang berasal dari dalam diri ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewenangannya disebabkan karena kondisi kedaruratan kesehatan pandemi Covid 19 pada masa tersebut serta keputusan pemerintah menetapkan kebijakan Work From Home (WFH) sebagaimana dituangkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020. Kebijakan Work From Home (WFH) dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah lainnya terkait pembatasan mobilitas dan menjaga jarak dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid 19.

Hasil analisis ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan terhadap pejabat Esselon III dan IV yang membawahi perencanaan, keuangan dan pelaporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini bahwa sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dibidang kesehatan, manajemen berupaya meningkatkan komitmen anggota organisasi terhadap pencapaian tujuan dengan cara menciptakan kenyamanan bagi para ASN dan para pemberi layanan lainnya dari segi finansial, keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Sebagai wujud upaya pemerintah untuk meningkatkan komitmen ASN, pada masa pandemi Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan Peraturan Gubernur No 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif, Honorarium, Uang Saku dan/atau Santunan Kematian Bagi Petugas Penanggulangan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Barat.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Muallifu *et al.* (2019) yang menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa karena aparatur yang memiliki komitmen organisasi akan menunjukkan tingkat keikutsertaannya terhadap pencapaian tujuan organisasi dan menyampaikan pertanggungjawaban guna mewujudkan akuntabilitas dan penelitian (Aprilya dan Fitria (2020)) yang menemukan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi kecepatan dan ketepatan kerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tentunya juga akan mempengaruhi laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 (2) Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 dan (3) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19

REFERANSI

- Aprilya, K. R., dan A. Fitria. 2020. "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, hlm.
- Arfiansyah, M. A. 2020. "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Journal of Islamic Finance and Accounting*, Vol. 3, No. 1, hlm: 67 - 82.
- Artini, N. L. W., dan I. P. D. S. Putra. 2020. "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung)". *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, Vol. Oktober 2020, No., hlm.
- Aziiz, M. N., dan S. D. Prastiti. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa". *Jurnal Akuntansi Aktual*, Vol. 6, No. 2, hlm: 280 - 344.
- Azizah, N., Junaidi, dan A. R. Setiawan. 2015. "Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 1, No. 2, hlm: 111 - 120.

- Cavoukian, A., S. Taylor, dan M. E. Abrams. 2010. "Privacy by Design: essential for organizational accountability and strong business practices". *Springerlink.com*, Vol. 3, No., hlm: 405 – 413.
- Chong, V. K., dan K. M. Chong. 2002. "Budget Goal Commitment and Informational Effects of Budget Participation on Performance: A Structural Equation Modeling Approach". *Behavioral Research In Accounting*, Vol. 14, No., hlm: 67 - 86.
- Fauziyah, M. R., dan N. Handayani. 2017. " Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 6, hlm.
- Hardiningsih, P., R. M. O., C. Srimindarti, dan I. Kristiana. 2019. "Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang)". *AKTSAR*, Vol. 2, No. 1, hlm: 21 - 42.
- Haryanto, S., M.Si, Ak., M. S. Drs. Sahrudin, Ak., dan M. S. Drs. Arifuddin, Ak. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanah, S., E. Nurhayati, dan D. Purnama. 2020. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan". *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4, No. 1, hlm: 17 - 27.
- Ichlas, M., A. Dr. Hasan Basri. M.Com, dan M. S. Dr. Muhammad Arfan. SE, Ak, CA. 2014. " Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh". *Jurnal Magister Akuntansi*, Vol. 3, No. 4, hlm: 76 - 84.
- Ikhsan, A., dan M. Isaac. 2008. *Accounting Behavioral*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indraswari, N. E., dan Y. Rahayu. 2021. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 4, hlm.
- Julia, D. i. A., dan Wahidahwati. 2020. "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 3, hlm: 1-23.
- Juwita, R. 2014. "Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 4, No. 2, hlm: 615 - 622.
- Kholmi, M. 2010. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi". *Ekonomika-Bisnis.*, Vol. 2, No. 2, hlm: 357 - 370.
- Mada, S., L. Kalangi, dan H. Gamaliel. 2017. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo". *Ejournal.unsrat.ac.id*, Vol., No., hlm.
- Marlina, E., S. Rahmayanti, dan A. D. R. A. Putri. 2021. "Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi, Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelola Dana Desa di Kecamatan Rakit Kulim". *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 11, No. 1, hlm: 89 - 98.
- Momuat, C. P. I. 2016. "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Dalam Rangka Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Pada Kabupaten Minahasa Tenggara)". *Jurnal EMBA*, Vol. 4, No. 1, hlm: 1519 - 1530.
- Mualifu, A. Guspul, dan Hermawan. 2019. "Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pemernitah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga)". *Journal of Economic, Business and Engineering*, Vol. 1, No. 1, hlm: 49 - 59.
- Mulyanto, N. A. Budiman, dan M. N. Fahmi. 2020. "Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating". *Jurnal Bingkai Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, hlm: 1 - 17.
- Mutiana, L., Y. Diantimala, dan Zuraida. 2017. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satker Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara)". *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 3, No. 2, hlm: 151 - 167.
- Nogueira, S. P. d. S., dan S. M. F. Jorge. 2017. "The Perceived Usefulness Of Financial Information For Decision-Making In Portuguese Municipalities: The Importance Of Internal Control". *Journal of Applied Accounting Research*, Vol. 18, No. 1, hlm: 116 - 136.
- Pahlawan, E. W., A. Wijayanti, dan Suhendro. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Indonesia Accounting Journal*, Vol. 2, No. 2, hlm: 162 - 172.
- PP No. 24 Tahun 2005. *Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- PP No. 60 Tahun 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pujiswara, I. B., N. T. Herawati, dan N. K. Sinarwati. 2014. "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah". *E-journal Jurusan Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2, No., hlm.
- Puspa, D. F., dan R. A. Prasetyo. 2020. "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 20, No. 2, hlm: 281 - 298.
- Rofika, dan Ardianto. 2014. "Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah". *Jurnal Akuntansi & Akuntabilitas Publik*, Vol. 2, No. 2, hlm: 197 - 209.
- Salehi, M., dan E. Torabi. 2012. "The Role Of Information Technology In Financial Reporting Quality: Iranian Scenario". *Scientific Journal of Croatia*, Vol. 6, No. 1, hlm: 115-127.
- Sapartiningsih, D., Suharno, dan D. Kristianto. 2018. "Analisis Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa". *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 14, No. 1, hlm: 100 - 114.
- Sarah, S., T. Taufik, dan D. Safitri. 2020. "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4, No. 4, hlm: 330 - 342.
- Sari, N. M. R., dan K. D. Padnyawati. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Kantor Desa Se-Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan)". *Hita Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, Vol., No., hlm.
- Setyanto, E., dan H. Ritchi. 2018. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA, Penerapan SPI dan Penerapan SAP pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 9, No. 1, hlm: 89 - 105.
- Sundari, D., dan J. Mulyadi. 2018. "Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Di Kementerian Pertahanan Indonesia". *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 5, No. 1, hlm: 26 -23 26.
- Suparman, W. E., S. E. Nyoman Trisna Herawati, M.Pd.Ak., dan S. E. Dr. Edy Sujana, M.Si.Ak. 2014. "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng". *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, Vol. 2, No. 1, hlm.
- Syafri, W., dan Alwi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Publik*. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Press.
- UU No. 28 tahun 1999. *Undang-Undang Republik Nidonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*. Jakarta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66.
- Widyaningsih, A. 2015. "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan". *Fokus Ekonomi*, Vol. 10, No. 1, hlm: 1 - 19.
- Widyatama, A., L. Novita, dan Diarespati. 2017. "Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)". *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 2, No. 2, hlm: 1-20.
- Yesinia, N. I., N. C. Yulianti, dan D. Puspitasari. 2018. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa". *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, Vol. 10, No. 1, hlm: 105-112.
- Zeyn, E. 2011. "Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi". *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, hlm: 21 - 37.
- Zulkifli, Sandrayati, dan N. Ariani. 2021. "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim". *Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, dan Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, hlm: 26-38